

Pendidikan Islam Pasca-Politik Identitas: Model Pembelajaran Fiqh al-Ta'ayush (Fikih Koeksistensi) untuk Konsolidasi Demokrasi Indonesia 2026-2029

Ikhwan Sawaty
Universitas Muhammadiyah Parepare
ikhwans@umpar.ac.id

Abstrak

Gelombang politik identitas berbasis agama dan etnisitas pasca-Reformasi telah menjadi penghambat utama konsolidasi demokrasi Indonesia, mengakibatkan polarisasi sosial, intoleransi, dan terperangkapnya demokrasi dalam prosedur elektoral semata. Penelitian ini berargumen bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki potensi strategis yang belum termaksimalkan untuk mentransformasi tantangan tersebut menjadi fondasi demokrasi yang substansial dan inklusif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis filosofis-normatif dan studi literatur mendalam, artikel ini mengusulkan pengembangan model pembelajaran inovatif berbasis *Fiqh al-Ta'ayush* (Fikih Koeksistensi). Konsep ini merekonstruksi fikih konvensional menjadi kerangka pedagogis yang menekankan prinsip hidup bersama dalam perbedaan, berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah*, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis isi kualitatif terhadap sumber-sumber primer pemikiran Islam kontemporer serta teori kritis Mazhab Frankfurt, penelitian ini menghasilkan model pembelajaran integratif lima fase yang dirancang untuk membentuk *civic disposition* peserta didik yang kritis, toleran, dan berkomitmen pada Pancasila. Analisis menunjukkan bahwa internalisasi *Fiqh al-Ta'ayush* dalam kurikulum PAI dapat berkontribusi signifikan pada tiga pilar konsolidasi demokrasi periode 2026–2029: penguatan legitimasi sistem demokrasi, peningkatan kualitas partisipasi publik yang inklusif, dan ketahanan sosial terhadap narasi politik identitas yang eksklusif. Penelitian ini menawarkan solusi praktis-pedagogis bagi dunia pendidikan Islam sekaligus kontribusi teoretis dalam mendialogkan tradisi fikih dengan teori demokrasi deliberatif.

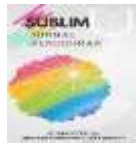
Kata Kunci: Politik Identitas; Konsolidasi Demokrasi; Pendidikan Islam; Fiqh al-Ta'ayush; Model Pembelajaran; Pedagogi Kritis; Indonesia 2026–2029.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang: Politik Identitas sebagai Ancaman Sistemik

Dua dasawarsa pasca-Reformasi 1998, Indonesia menghadapi paradoks demokrasi yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, liberalisasi politik telah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, dengan pemilu langsung, desentralisasi kekuasaan, dan kebebasan sipil yang jauh lebih terjamin dibanding era otoritarian. Di sisi lain, ruang kebebasan yang terbuka justru diisi oleh politik segmentasi berbasis agama, etnis, dan kedaerahan yang menggerogoti fondasi demokrasi substantif (. 2018). Alih-alih memperdebatkan program publik dan visi kesejahteraan, kontestasi elektoral lebih banyak diwarnai pembelahan sosial yang diperdalam secara sistematis oleh aktor politik dan diperkuat oleh algoritma media sosial. Dalam proses itu, demokrasi Indonesia terperangkap dalam prosedur elektoral semata, sementara legitimasinya diukur secara situasional: hanya diterima ketika hasilnya menguntungkan kelompok identitas sendiri (. 2020).

Fenomena ini bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan ancaman sistemik terhadap konsolidasi demokrasi. Politik identitas telah terbukti mampu membajak institusi-institusi demokrasi yang seharusnya menjadi kanal partisipasi warga. Partai politik kehilangan fungsi sebagai agregator kepentingan publik dan bermutasi menjadi perusahaan elektoral yang menjual



akses kekuasaan (Abadi 2024). Desentralisasi yang semula diharapkan mendekatkan pelayanan dan memperkuat partisipasi warga, dalam praktiknya melahirkan feodalisme elektoral lokal di mana sentimen "putra daerah" menjadi instrumen legitimasi untuk menguasai sumber daya. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang publik egaliter justru berevolusi menjadi infrastruktur polarisasi permanen melalui mekanisme algoritma yang memaksimalkan konten emosional dan konfirmasi bias (Adam 2022).

Interaksi sistemik antara ketiga arena ini—partai, desentralisasi, dan media sosial—bekerja dalam lingkaran umpan balik yang memperdalam segmentasi identitas. Partai yang gagal mengagregasi kepentingan publik beralih ke mobilisasi identitas; desentralisasi tanpa pelembagaan representasi lokal menciptakan pasar politik identitas di daerah; media sosial menyediakan infrastruktur amplifikasi yang membuat setiap sentimen identitas segera menjadi viral dan terpolarisasi. Yang terjadi bukan sekadar kegagalan fungsional, melainkan pembajakan sistemik: instrumen demokrasi diputarbalikkan menjadi alat reproduksi politik identitas (Adam 2022).

1.2 Urgensi Periodisasi 2026-2029

Periode 2026-2029 menjadi momentum kritis bagi masa depan demokrasi Indonesia. Beberapa faktor menjadikan rentang waktu ini sangat menentukan. Pertama, pemilu serentak 2024 dan pilkada 2024 akan memasuki fase konsolidasi kekuasaan pada periode ini, di mana koalisi-koalisi pascapemilu akan membentuk konfigurasi politik nasional dan daerah untuk lima tahun ke depan. Kedua, teknologi personalisasi kampanye berbasis data diprediksi akan mencapai tingkat kecanggihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan aktor politik menargetkan pesan-pesan identitas secara mikro kepada segmen pemilih tertentu dengan presisi tinggi. Ketiga, bonus demografi Indonesia mencapai puncaknya pada periode ini, dengan dominasi generasi muda dalam struktur kependudukan yang akan menentukan arah politik nasional untuk dekade-dekade berikutnya (Naufan dan Hannase 2021).

Tanpa intervensi sistemik yang terencana, politik identitas berpotensi terus menguat dan semakin mengakar dalam budaya politik Indonesia. Resistensi yang ada saat ini, meskipun penting dan patut diapresiasi, masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan. Komunitas lintas iman seperti Jaringan Gusdurian dan Maarif Institute telah mengembangkan kurikulum kewargaan dan dialog antarkeyakinan, namun jangkauannya terbatas pada kelas menengah terdidik. Gerakan literasi digital yang menjamur pascapilkada 2017 dan 2019 telah bergeser dari sekadar verifikasi hoaks ke produksi narasi tandingan, namun sumber dayanya sangat timpang dibanding mesin politik yang didukung pendanaan oligarki. Sekolah demokrasi yang difasilitasi KPU dan Bawaslu telah melahirkan pemilih kritis, namun pemilih kritis tetap harus memilih di antara kandidat yang semuanya bermain di lapangan politik identitas karena ketiadaan partai programatik yang menyediakan alternatif (Muhammad 2021).

1.3 Posisi Strategis Pendidikan Islam

Di tengah carut-marut politik identitas dan keterbatasan resistensi kewargaan yang ada, Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis yang selama ini belum termaksimalkan. PAI memiliki akses langsung ke puluhan juta peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, tersebar di seluruh penjuru tanah air, dari perkotaan hingga pelosok desa. Lebih dari itu, PAI memiliki legitimasi keagamaan yang tidak dimiliki institusi pendidikan umum, sehingga mampu berbicara atas nama agama sekaligus membongkar manipulasi simbol-simbol agama oleh politik identitas (Islamy 2022).

Namun potensi ini belum terwujud karena pendidikan Islam selama ini lebih banyak berkuat pada penguatan internal umat: perbaikan akidah, pendalaman syariah, dan pembentukan karakter individu yang saleh. Orientasi ini penting, tetapi tidak cukup untuk merespons tantangan politik identitas yang telah memasuki ranah struktural. Ketika politik identitas bekerja dengan meminjam ayat dan hadis untuk melegitimasi eksklusi, institusi pendidikan Islam tidak memiliki perangkat



epistemik untuk melakukan kritik internal. Mereka lebih sibuk memverifikasi apakah suatu kutipan hadis sahih secara sanad ketimbang membongkar bagaimana hadis tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang menindas kelompok lain (Abadi 2024).

Persoalan mendasar ini berakar pada paradigma pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam kontemporer masih didominasi nalar epistemologis taklid yang memisahkan ilmu dari realitas kekuasaan. Ilmu dipahami sebagai kumpulan teks suci dan komentar ulama yang sudah mapan, bukan sebagai aktivitas kritis untuk membaca realitas dalam terang teologi pembebasan. Akibatnya, ketika kebijakan publik yang diskriminatif disahkan, ketika pemodal politik menggunakan uang untuk membeli suara rakyat miskin atas nama solidaritas seiman, ketika media sosial dibanjiri kebencian atas nama pembelaan agama, pendidikan Islam umumnya diam (Afandi 2017).

1.4 State of the Art dan Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang relasi Islam dan demokrasi di Indonesia telah berkembang dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, pasca-Reformasi hingga pertengahan 2000-an, didominasi diskursus tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi, dengan fokus pada apakah nilai-nilai Islam sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal. Gelombang kedua, pertengahan 2000-an hingga pertengahan 2010-an, bergeser pada kajian tentang perilaku politik umat Islam, dukungan elektoral terhadap partai-partai Islam, dan peran ormas keagamaan dalam pemilu. Gelombang ketiga, pascapilkada DKI 2017 hingga sekarang, terfokus pada politik identitas, polarisasi sosial-keagamaan, dan resistensi terhadap intoleransi.

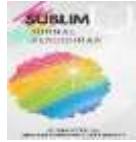
Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melampaui ketiga gelombang tersebut. Pertama, tidak sekadar bertanya apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, tetapi bagaimana tradisi fikih itu sendiri dapat direkonstruksi menjadi kerangka pedagogis untuk konsolidasi demokrasi. Kedua, tidak sekadar menganalisis perilaku politik umat, tetapi mengintervensi pembentukan perilaku tersebut melalui desain pembelajaran yang sistemik. Ketiga, tidak sekadar meresistensi politik identitas secara reaktif, tetapi membangun fondasi epistemik dan pedagogis yang preventif dan transformatif.

Konsep *Fiqh al-Ta'ayush* (Fikih Koeksistensi) yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari wacana fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyāt*) dan fikih toleransi (*fiqh al-tasāmuḥ*) yang telah berkembang di dunia Islam kontemporer. Namun *Fiqh al-Ta'ayush* memiliki cakupan yang lebih luas: ia tidak hanya berbicara tentang bagaimana kelompok minoritas hidup di tengah mayoritas, tetapi tentang bagaimana semua warga negara—mayoritas maupun minoritas—hidup bersama dalam perbedaan. Ia merekonstruksi fikih konvensional menjadi kerangka etis-sosial yang menekankan prinsip *al-ta'āyush ma'a al-ikhtilāf* (hidup bersama dalam perbedaan), berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan universal syariah), musyawarah (*shūrā*), dan keadilan sosial (*'adālah*).

1.5 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana interaksi sistemik antara partai politik, desentralisasi, dan media sosial dalam mereproduksi politik identitas di Indonesia?
2. Mengapa resistensi kewargaan yang ada selama ini belum mampu secara efektif membendung politik identitas?
3. Bagaimana dekonstruksi epistemik atas pendidikan Islam dapat membuka jalan bagi paradigma baru yang transformatif?



4. Bagaimana model pembelajaran berbasis *Fiqh al-Ta'ayush* dapat dirancang dan diimplementasikan dalam Pendidikan Agama Islam untuk konsolidasi demokrasi Indonesia 2026-2029?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis secara sistemik ekosistem politik identitas di Indonesia; (2) mengkritisi keterbatasan resistensi kewargaan yang ada; (3) melakukan dekonstruksi epistemik atas paradigma pendidikan Islam; dan (4) merumuskan model pembelajaran *Fiqh al-Ta'ayush* yang aplikatif dan transformatif.

1.6 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, ia berkontribusi pada pengayaan teori demokrasi deliberatif dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan tradisi fikih, membuka ruang dialog baru antara studi Islam dan teori politik kontemporer. Ia juga mengembangkan pendekatan teori kritis dalam konteks pendidikan Islam, menunjukkan bagaimana warisan Mazhab Frankfurt dapat didialogkan dengan pemikiran Islam kontemporer seperti al-Jabiri, Hanafi, dan Alatas.

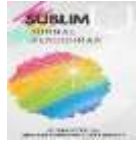
Secara praktis, penelitian ini menawarkan solusi konkret bagi dunia pendidikan Islam: sebuah model pembelajaran yang siap diujicobakan dan diimplementasikan. Model ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, sintaks lima fase yang terstruktur, sistem evaluasi yang komprehensif, serta contoh implementasi pada kasus-kasus aktual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada wacana kritis, tetapi juga menyediakan perangkat operasional bagi para guru, dosen, pengembang kurikulum, dan pembuat kebijakan di Kementerian Agama.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena secara mendalam, membongkar struktur epistemik yang tersembunyi, dan merumuskan model konseptual yang kaya akan makna, bukan menguji hipotesis melalui pengukuran kuantitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan, yang dalam konteks ini adalah makna politik identitas dan respons pendidikan Islam terhadapnya.

Pendekatan yang digunakan adalah analisis filosofis-normatif yang memadukan tradisi pemikiran Islam klasik-kontemporer dengan teori kritis Mazhab Frankfurt. Analisis filosofis memungkinkan peneliti untuk menggali asumsi-asumsi fundamental yang mendasari praktik pendidikan Islam dan praktik politik identitas, sementara analisis normatif memungkinkan evaluasi terhadap praktik-



praktik tersebut berdasarkan kerangka nilai tertentu—dalam hal ini nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori:

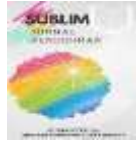
Sumber Primer meliputi:

1. Karya-karya Muhammad Abid al-Jabiri, terutama trilogi *Naqd al-'Aql al-'Arabi* (Kritik Nalar Arab) yang terdiri dari *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*, *Bunyah al-'Aql al-'Arabī*, dan *al-'Aql al-Siyāsī al-'Arabī*. Karya-karya ini menjadi fondasi utama untuk menganalisis struktur nalar yang mendominasi epistemologi pendidikan Islam.
2. Karya-karya Hassan Hanafi, terutama *Al-Turats wa al-Tajdid* (Tradisi dan Pembaruan) dan *Min al-'Aqīdah ila al-Tsawrah* (Dari Akidah ke Revolusi), yang memberikan kerangka teologi pembebasan dalam Islam.
3. Karya-karya Syed Hussein Alatas, terutama *Intellectuals in Developing Societies* dan *The Myth of the Lazy Native*, yang menyediakan analisis sosiologis tentang nalar terkepung pascakolonial.
4. Literatur mutakhir tentang *Fiqh al-Ta'ayush* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dari pemikir seperti Jasser Auda (*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*), Ahmad Imam Mawardi (*Fiqh Minoritas*), dan karya-karya kolektif dari forum internasional seperti International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Sumber Sekunder meliputi:

1. Artikel jurnal nasional dan internasional tentang politik identitas Indonesia, konsolidasi demokrasi, dan perilaku pemilih, yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir.
2. Laporan penelitian dari lembaga-lembaga terpercaya seperti CSIS, Saiful Mujani Research Center, Indikator Politik Indonesia, dan Drone Emprit tentang polarisasi sosial-media dan perilaku digital masyarakat Indonesia.
3. Dokumen kebijakan terkait kurikulum Pendidikan Agama Islam, termasuk Keputusan Menteri Agama tentang Kurikulum PAI, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, dan dokumen Kurikulum Merdeka.
4. Literatur tentang pedagogi kritis dari tradisi Paulo Freire dan pengembangannya dalam konteks pendidikan Islam oleh para sarjana seperti Farid Esack dan Abdul Rahman Abdullah.

2.3 Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap:

Tahap pertama, penelusuran awal dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan ProQuest dengan kata kunci: "political identity Indonesia", "democratic consolidation", "Islamic education", "Fiqh al-Ta'ayush", "critical pedagogy", "Al-Jabiri", "Hassan Hanafi", dan kombinasinya.

Tahap kedua, dari hasil penelusuran awal, dilakukan seleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penulis/penerbit, dan kemutakhiran (khusus untuk data empiris tentang politik Indonesia, diprioritaskan lima tahun terakhir).

Tahap ketiga, literatur yang terpilih diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tematik: (a) literatur tentang ekosistem politik identitas, (b) literatur tentang resistensi kewargaan, (c) literatur tentang epistemologi pendidikan Islam, dan (d) literatur tentang *Fiqh al-Ta'ayush* dan pedagogi transformatif.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis isi kualitatif (qualitative content analysis)* yang dikembangkan oleh Philipp Mayring. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks secara sistematis sambil tetap mempertahankan kekayaan konteks dan makna. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap:

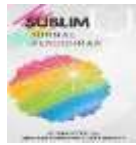
Tahap 1: Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti memilah konsep-konsep kunci dari berbagai sumber berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Reduksi dilakukan dengan membuat ringkasan, mengabstraksi, dan memilih informasi yang signifikan. Misalnya, dari puluhan artikel tentang politik identitas, peneliti mengidentifikasi tema-tema berulang seperti "krisis ideologis partai", "feodalisme elektoral lokal", dan "algoritma polarisasi" yang kemudian menjadi kategori analisis.

Tahap 2: Kategorisasi

Temuan-temuan dari berbagai sumber dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang sesuai dengan struktur pembahasan penelitian:

- Kategori 1: Ekosistem politik identitas (sub-kategori: partai politik, desentralisasi, media sosial)
- Kategori 2: Resistensi kewargaan dan keterbatasannya
- Kategori 3: Kritik epistemik atas pendidikan Islam (sub-kategori: nalar taklid, alienasi profetik, dikotomi keilmuan)



- Kategori 4: Prinsip-prinsip *Fiqh al-Ta'ayush*
- Kategori 5: Model pembelajaran transformatif

Tahap 3: Sintesis

Pada tahap ini, peneliti menghubungkan antar kategori untuk membangun argumen yang koheren dan komprehensif. Sintesis dilakukan dengan mencari relasi dialektis antar kategori: bagaimana krisis epistemik pendidikan Islam (kategori 3) menyebabkan ketidakmampuan merespons politik identitas (kategori 1) dan membuat resistensi yang ada (kategori 2) tidak optimal; bagaimana prinsip-prinsip *Fiqh al-Ta'ayush* (kategori 4) dapat diterjemahkan ke dalam desain pedagogis (kategori 5) yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Tahap 4: Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil sintesis, kemudian diverifikasi dengan kembali merujuk pada sumber-sumber primer untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan tidak keluar dari konteks keilmuan yang bersangkutan. Verifikasi juga dilakukan melalui diskusi dengan rekan sejawat (*peer debriefing*) untuk menguji validitas temuan.

2.5 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi:

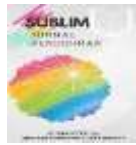
Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengcross-check informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, analisis tentang politik identitas tidak hanya bersandar pada laporan media, tetapi juga pada riset akademik, data lembaga survei, dan analisis media sosial dari lembaga seperti Drone Emprit.

Kedua, kecukupan referensial, yaitu memastikan bahwa bahan-bahan yang dijadikan sumber memiliki otoritas keilmuan yang memadai dan mencakup spektrum perspektif yang luas. Untuk pemikiran Islam, tidak hanya merujuk pada tokoh-tokoh mainstream, tetapi juga pada pemikiran kritis seperti al-Jabiri dan Hanafi yang merepresentasikan keberanian melakukan dekonstruksi.

Ketiga, audit trail, yaitu mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian sehingga memungkinkan peneliti lain untuk menelusuri kembali bagaimana kesimpulan diperoleh. Dokumentasi ini mencakup catatan pencarian literatur, matriks klasifikasi sumber, dan catatan analisis.

HASIL PENELITIAN

3.1 Ekosistem Politik Identitas Indonesia



Hasil analisis terhadap interaksi sistemik tiga arena politik mengungkapkan temuan-temuan penting berikut:

Pertama, krisis ideologis partai politik mencapai tingkat yang kronis. Dari penelusuran literatur dan data survei, ditemukan bahwa partai-partai nasional saat ini tidak lagi memiliki diferensiasi ideologis yang jelas. Mereka melebur dalam koalisi "pelangi" yang mengabaikan prinsip, dengan praktik politik yang didominasi pragmatisme jangka pendek. Survei Celios 2025 mencatat hanya 40 persen pemilih muda merasa terwakili oleh partai mana pun, sementara 60 persen kader muda bahkan tidak memahami ideologi partainya sendiri. Dalam situasi vakum ideologis ini, partai kehilangan kapasitas sebagai agregator kepentingan publik. Ruang kosong itu diisi oleh mobilisasi identitas yang lebih sederhana dan emosional.

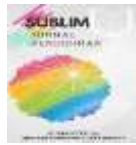
Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa akar persoalan terletak pada struktur pendanaan politik yang timpang. Ketergantungan partai pada sumbangan oligarki membuat mereka lebih responsif terhadap kepentingan donor ketimbang konstituen. Partai bermutasi menjadi perusahaan elektoral yang menjual akses kekuasaan. Politik identitas, dalam konteks ini, berfungsi ganda: sebagai strategi kemenangan yang murah dan sebagai alat pembenaran moral atas aliansi lintas ideologi yang oportunis.

Kedua, desentralisasi melahirkan feodalisme elektoral lokal. Otonomi daerah yang tidak diimbangi penguatan partisipasi warga menghasilkan kepala daerah yang menjelma menjadi patron mengontrol akses terhadap proyek, perizinan, dan anggaran. Sentimen putra daerah tidak sekadar alat kampanye, melainkan fondasi legitimasi untuk membangun dinasti politik dan jaringan patronage. Politik balas budi menggantikan akuntabilitas publik.

Analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa UU Pemerintahan Daerah memberikan dominasi luar biasa kepada eksekutif daerah. DPRD yang seharusnya menjadi penyeimbang, dalam praktiknya kerap menjadi bagian dari kartel lokal yang menikmati bagi-bagi komisi. Partisipasi warga direduksi menjadi ritual lima tahunan; di luar pemilu, tidak ada mekanisme kontrol efektif.

Ketiga, media sosial menjadi infrastruktur polarisasi permanen. Analisis terhadap studi Drone Emprit dan Monash Data and Democracy Research Hub mengungkapkan bahwa algoritma platform digital tidak netral. Ia dirancang untuk memaksimalkan *engagement*, dan *engagement* tertinggi dipicu oleh konten emosional dan kontroversial. Riset terhadap 10 juta unggahan selama demonstrasi Agustus 2025 menemukan bahwa 47 persen didominasi narasi kemarahan, 29 persen bernuansa toksik, dan 20 persen mengarah pada polarisasi kelas.

Yang lebih sistemik, algoritma menciptakan gelembung filter (*filter bubble*) yang memperkuat bias konfirmasi dan menjauhkan pengguna dari perspektif berbeda. Dalam ruang gema ini, narasi "kami versus mereka" menemukan lahan subur. Elite politik memanfaatkan kelimpahan informasi dengan mengorganisir pendengung dan pemengaruh untuk mengamplifikasi pesan-pesan identitas secara masif.



3.2 Resistensi Kewargaan dan Titik-Titik Lemahnya

Hasil analisis terhadap berbagai inisiatif resistensi kewargaan mengungkapkan temuan-temuan berikut:

Komunitas lintas iman seperti Jaringan Gusdurian, Maarif Institute, dan berbagai forum kerukunan umat beragama telah menunjukkan kapasitas luar biasa dalam mengembangkan kurikulum kewargaan yang ditanamkan di sekolah minggu, pesantren, dan kelompok pemuda. Mereka membongkar logika segmentasi dengan membiasakan publik pada pengalaman keseharian bekerja sama melampaui batas agama.

Gerakan literasi digital telah berevolusi dari pendekatan verifikasi individu ke produksi narasi kolektif. Inisiatif seperti Ruangobrol.id, Cekfakta.com, dan kolaborasi kampus dengan masyarakat sipil mulai melatih warga menjadi produsen konten yang membanjiri lini masa dengan narasi kewargaan.

Sekolah demokrasi, parlementer remaja, dan program kampus merdeka yang difasilitasi KPU dan Bawaslu mulai membangun pemilih muda yang kritis. Data menunjukkan efektivitas pendidikan kewargaan ketika pemilih muda mulai menanyakan rekam jejak kebijakan dan menelusuri afiliasi kepentingan kandidat.

Namun analisis kritis mengungkapkan empat titik lemah struktural:

Pertama, resistensi kewargaan beroperasi dengan sumber daya yang sangat timpang dibandingkan dengan mesin politik yang didukung pendanaan oligarki dan kapitalisasi platform digital.

Kedua, praktik pendidikan kewargaan menjangkau segmen masyarakat yang secara sosial-ekonomi sudah diuntungkan, sementara basis massa politik identitas justru berada di kelompok rentan yang mengalami kerentanan ekonomi.

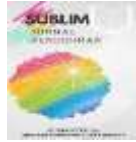
Ketiga, produksi narasi positif menghadapi kontradiksi fundamental dengan logika algoritma yang tidak netral secara komersial.

Keempat, negara berada dalam posisi ambivalen struktural karena para pengambil kebijakan sendiri diuntungkan oleh ekosistem yang ada.

3.3 Dekonstruksi Epistemik Pendidikan Islam

Analisis terhadap epistemologi pendidikan Islam mengungkapkan tiga lapisan problematis:

Lapisan pertama: dominasi nalar taklid. Pendidikan Islam didominasi paradigma bahwa ilmu adalah kumpulan teks suci dan komentar ulama yang sudah mapan, bukan aktivitas kritis membaca realitas. Metode pembelajaran lebih berorientasi hafalan ketimbang analisis struktural.



Lapisan kedua: alienasi dari misi profetik. Ajaran Islam sebagai ilmu memiliki kepentingan emansipatoris yang melekat, tetapi pendidikan Islam mereduksi misi profetik ini menjadi doktrin verbal tanpa kritik ideologi.

Lapisan ketiga: dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Dualisme epistemik warisan kolonialisme menciptakan ketidakberdayaan analitis: ahli agama tidak mampu membaca kebijakan publik, ahli kebijakan tidak peka terhadap manipulasi simbol agama.

Melalui kerangka Habermas, ditemukan bahwa pendidikan Islam arus utama beroperasi dalam logika kepentingan teknis (obsesi metodologi) dan praktis (konsensus dialog), tanpa kepentingan emansipatoris yang membongkar relasi kuasa.

Melalui kerangka al-Jabiri, ditemukan dominasi nalar *bayani* atas nalar *burhani* yang melumpuhkan kapasitas kritis. Kelompok eksklusivis memanfaatkan ini dengan menggunakan ayat secara selektif, sementara nalar *bayani* tidak memiliki mekanisme internal untuk mempertanyakan selektivitas tersebut.

3.4 Model Pembelajaran Fiqh al-Ta'ayush

Hasil rekonstruksi pedagogis menghasilkan model pembelajaran dengan komponen-komponen berikut:

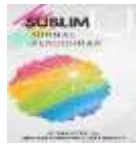
Landasan filosofis model ini adalah: (a) teologis: *rahmatan lil 'alamin* sebagai tujuan universal; (b) epistemologis: integrasi nalar *bayani* dan *burhani* dalam kerangka *maqāṣid*; (c) pedagogis: pedagogi kritis yang memposisikan peserta didik sebagai subjek transformatif.

Tujuan pembelajaran mencakup tiga ranah: kognitif (memahami konsep koeksistensi dan menganalisis manipulasi agama), afektif (mengembangkan empati dan keberanian moral), dan psikomotorik/sosial (terampil berdialog dan berpartisipasi dalam advokasi kebijakan).

Sintaks model terdiri dari lima fase:

1. **Identifikasi Masalah Koeksistensi:** peserta didik dihadapkan pada isu aktual konflik sosial-keagamaan.
2. **Telaah Teks dan Konteks:** analisis simultan terhadap teks keagamaan dan data empiris.
3. **Dialog dan Musyawarah Nilai:** forum simulasi dengan prinsip *shūrā* yang setara.
4. **Perumusan Solusi Berbasis Maqāṣid:** rekomendasi yang mempertimbangkan lima prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.
5. **Refleksi dan Komitmen Publik:** jurnal refleksi dan deklarasi komitmen kolektif.

Sistem evaluasi meliputi portofolio, jurnal refleksi, observasi partisipasi, dan proyek aksi sosial.



Contoh implementasi dirancang untuk dua kasus: penolakan pendirian rumah ibadat dan politisasi ayat di media sosial menjelang pilkada.

PEMBAHASAN

5.1 Signifikansi Model *Fiqh al-Ta'ayush* dalam Lanskap Pendidikan Islam Kontemporer

Model pembelajaran *Fiqh al-Ta'ayush* yang dihasilkan dalam penelitian ini menempati posisi epistemologis yang unik dalam lanskap pendidikan Islam kontemporer. Ia tidak sekadar menawarkan metode pengajaran baru, melainkan merekonstruksi fundamental cara pendidikan Islam memahami dirinya sendiri, relasinya dengan realitas, dan misinya dalam masyarakat majemuk. Untuk memahami signifikansi ini, perlu ditempatkan dalam konteks tiga paradigma dominan yang selama ini mewarnai pendidikan Islam di Indonesia.

Pertama, paradigma *normatif-doktriner* yang memandang pendidikan Islam sebagai transmisi nilai-nilai keagamaan yang sudah mapan dan tidak perlu dipersoalkan. Dalam paradigma ini, tujuan pendidikan adalah mencetak individu yang saleh secara ritual, patuh pada otoritas keagamaan, dan mampu membedakan yang halal dari yang haram. Pendekatan ini melahirkan lulusan yang kuat dalam hafalan teks tetapi lemah dalam membaca realitas sosial-politik yang kompleks. Ketika berhadapan dengan politik identitas, mereka mudah menjadi sasaran manipulasi karena tidak memiliki perangkat kritis untuk membedakan antara ajaran agama yang otentik dan kepentingan politik yang membajak simbol agama (Akli dan Noviani 2023).

Kedua, paradigma *apologetis-reaktif* yang berkembang sebagai respons terhadap hegemoni Barat dan tantangan modernitas. Pendidikan Islam dalam paradigma ini sibuk membuktikan bahwa Islam juga memiliki demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan sebagainya. Orientasi apologetis ini, sebagaimana dikritik Hassan Hanafi, melumpuhkan kapasitas kritis karena kerangka evaluasi selalu ditentukan oleh lawan bicara. Pendidikan Islam tidak pernah sampai pada pertanyaan tentang apa masalahnya sendiri dengan kategorinya sendiri (Nasution 2026).

Ketiga, paradigma *teknis-instrumental* yang mereduksi pendidikan Islam menjadi sekadar pencapaian kompetensi yang terukur secara kuantitatif. Dalam paradigma ini, keberhasilan pendidikan diukur dari nilai ujian, akreditasi, dan indikator-indikator birokratis lainnya. Yang hilang adalah pertanyaan tentang untuk apa kompetensi itu digunakan dan kepentingan siapa yang dilayani.

Model *Fiqh al-Ta'ayush* melampaui ketiga paradigma tersebut dengan menawarkan paradigma keempat: *emansipatoris-transformatif*. Dalam paradigma ini, pendidikan Islam dipahami sebagai proyek pembebasan yang secara simultan bekerja pada tiga level: pembebasan kesadaran individu dari belenggu taklid dan doktrinasi, pembebasan relasi sosial dari struktur diskriminasi dan ketimpangan, serta pembebasan epistemik dari dominasi nalar tunggal yang memarginalkan realitas (. 2018).

Signifikansi model ini terletak pada kemampuannya menjembatani ketegangan yang selama ini tidak terpecahkan dalam wacana pendidikan Islam: ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara teks dan realitas, antara kesalahan individual dan tanggung jawab sosial. Model ini tidak memilih salah satu kutub, tetapi membangun relasi dialektis di antara keduanya (Halim 2022).



Teks tidak ditinggalkan, tetapi dipahami dalam konteks realitas yang terus berubah. Kesalahan individual tidak diabaikan, tetapi ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial. Tradisi tidak dibuang, tetapi didekonstruksi untuk menemukan kembali memori emansipatoris yang terpendam di dalamnya (Ibrahim 2008).

5.2 Integrasi Nalar Bayani dan Burhani: Resolusi atas Dualisme Epistemik

Salah satu kontribusi teoretis paling signifikan dari model ini adalah tawaran resolusi atas dualisme epistemik yang selama ini melumpuhkan pendidikan Islam. Al-Jabiri telah mendiagnosis dengan cermat bagaimana dominasi nalar *bayani* atas nalar *burhani* menciptakan tradisi keilmuan yang otoriter dan anti-kritis (Agustian 2020). Namun al-Jabiri berhenti pada diagnosis; ia tidak mengembangkan secara rinci bagaimana integrasi kedua nalar itu bisa dioperasionalkan dalam praktik pendidikan.

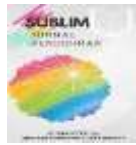
Model *Fiqh al-Ta'ayush* menjawab kekosongan ini melalui desain Fase 2: Telaah Teks dan Konteks. Dalam fase ini, peserta didik tidak cukup hanya menelusuri ayat dan hadis tentang suatu isu (nalar *bayani*), tetapi juga harus menganalisis data empiris tentang isu tersebut (nalar *burhani*). Lebih dari itu, mereka diharuskan untuk mendialogkan keduanya: apakah penafsiran tekstual tertentu melahirkan keadilan atau justru diskriminasi dalam konteks kekinian? Dengan kata lain, realitas tidak lagi menjadi objek aplikasi teks yang pasif, melainkan menjadi sumber otoritas yang setara yang dapat menguji validitas suatu penafsiran (Khumaini, Burhanuddin, dan Wiranata 2023).

Implikasi dari integrasi ini sangat mendalam. *Pertama*, ia mengakhiri monopoli otoritas keilmuan oleh mereka yang hanya menguasai teks. Seorang lulusan pendidikan Islam yang tidak memahami sosiologi konflik, ekonomi politik, atau analisis kebijakan publik tidak dapat lagi mengklaim otoritas dalam membahas isu-isu sosial-keagamaan kontemporer. *Kedua*, ia membuka ruang bagi lahirnya generasi cendekiawan Muslim yang memiliki perangkat ganda: kedalaman teks untuk membongkar penafsiran sewenang-wenang dan keluasan analisis realitas untuk menakar konsekuensi sosial dari setiap klaim kebenaran. *Ketiga*, ia mempersulit upaya manipulasi agama oleh kepentingan politik, karena setiap klaim keagamaan harus melewati uji realitas: apakah ia membawa kedamaian atau kekerasan, keadilan atau diskriminasi, persatuan atau perpecahan? (Abdiyah 2021)

5.3 Dari Dialog ke Advokasi Kebijakan: Memperluas Ruang Partisipasi

Kritik atas resistensi kewargaan yang ada mengungkapkan kelemahan mendasar: dialog dan produksi narasi tandingan, meskipun penting, tidak cukup untuk mengubah struktur insentif yang selama ini menguntungkan politik identitas. Model *Fiqh al-Ta'ayush* merespons kritik ini dengan merancang Fase 4: Perumusan Solusi Berbasis Maqāṣid yang secara eksplisit mengarahkan peserta didik pada advokasi kebijakan.

Dalam fase ini, solusi yang dirumuskan tidak berhenti pada sikap bersama atau kampanye sosial, tetapi juga mencakup rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah, naskah akademik untuk revisi peraturan yang diskriminatif, atau rancangan program pemberdayaan yang berpihak pada kelompok rentan (Naufan dan Hannase 2021). Dengan kata lain, peserta didik dilatih untuk



menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam bahasa kebijakan publik yang dapat diperjuangkan di ruang-ruang pengambilan keputusan (Islamy 2022).

Ini adalah langkah maju yang signifikan dari model pendidikan kewargaan pada umumnya. Selama ini, pendidikan kewargaan di sekolah cenderung berhenti pada penanaman nilai dan pengetahuan prosedural tentang demokrasi, tanpa membekali peserta didik dengan keterampilan untuk mempengaruhi kebijakan. Akibatnya, lulusan sekolah memahami pentingnya demokrasi tetapi tidak tahu bagaimana membuat demokrasi bekerja untuk kepentingan publik. Model *Fiqh al-Ta'ayush* mengisi kekosongan ini dengan menjadikan advokasi kebijakan sebagai bagian integral dari pembelajaran.

Lebih jauh, orientasi pada advokasi kebijakan ini menjawab dilema strategis yang dihadapi komunitas kewargaan: bagaimana memasuki arena kekuasaan tanpa terkooptasi oleh kekuasaan. Dengan membekali peserta didik dengan keterampilan advokasi sejak dini, model ini menciptakan kader-kader yang tidak asing dengan mekanisme pengambilan keputusan dan memiliki kapasitas untuk menduduki ruang-ruang publik yang selama ini ditinggalkan kosong oleh mereka yang memiliki komitmen pada keberagaman dan keadilan.

5.4 Relevansi Model untuk Konsolidasi Demokrasi 2026-2029

Jika ditempatkan dalam konteks periodisasi 2026-2029, relevansi model ini menjadi semakin jelas. Periode ini akan menjadi saksi dari konsolidasi kekuasaan pascapemilu serentak 2024, puncak bonus demografi dengan dominasi generasi muda, dan eskalasi teknologi personalisasi kampanye berbasis data. Dalam lanskap ini, pendidikan Islam memiliki peluang emas untuk menjadi benteng terakhir melawan politik identitas yang semakin canggih.

Model *Fiqh al-Ta'ayush* berkontribusi pada konsolidasi demokrasi melalui tiga mekanisme. *Pertama*, penguatan legitimasi sistem demokrasi di tingkat masyarakat. Dengan membekali peserta didik dengan pemahaman bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral melainkan sistem yang menjamin perlindungan hak-hak dasar sesuai *maqāṣid al-sharī'ah*, model ini membangun dukungan normatif terhadap demokrasi yang tidak situasional.

Kedua, peningkatan kualitas partisipasi publik yang inklusif dan rasional. Peserta didik yang telah melalui lima fase pembelajaran ini tidak akan mudah terprovokasi oleh kampanye identitas, karena mereka memiliki perangkat untuk membedakan antara retorika dan substansi, antara simbol dan kebijakan. Mereka juga terlatih untuk berdialog dengan perbedaan, sehingga partisipasi politik mereka tidak lagi eksklusif tetapi inklusif.

Ketiga, ketahanan sosial terhadap narasi politik identitas. Dalam jangka panjang, ketika jutaan lulusan pendidikan Islam telah menginternalisasi *Fiqh al-Ta'ayush*, akan terbentuk *critical mass* warga negara yang imun terhadap mobilisasi identitas. Mereka akan menjadi agen-agen yang menyebarkan nalar koeksistensi di lingkungan masing-masing, menciptakan ekosistem sosial yang tidak ramah bagi politik identitas.

5.5 Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan



Sebagai penelitian konseptual, model *Fiqh al-Ta'ayush* memiliki keterbatasan yang perlu diakui. *Pertama*, model ini belum diujicobakan secara empiris. Efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran masih perlu diuji melalui penelitian tindakan kelas atau eksperimen kuasi di berbagai setting pendidikan: madrasah, pesantren, sekolah umum, dan perguruan tinggi.

Kedua, model ini masih bersifat generik dan perlu dikontekstualisasikan untuk jenjang pendidikan yang berbeda. Apa yang efektif untuk mahasiswa UIN belum tentu efektif untuk siswa MTs. Pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan moral peserta didik menjadi agenda penelitian lanjutan yang penting.

Ketiga, implementasi model ini membutuhkan guru yang tidak hanya menguasai materi PAI, tetapi juga terlatih dalam pedagogi kritis dan fasilitasi dialog. Padahal, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru PAI masih terjebak dalam paradigma normatif-doktriner. Pengembangan program pelatihan guru yang efektif menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi model ini.

Keempat, model ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan yang sistemik. Perubahan kurikulum, penyediaan bahan ajar, dan reformasi sistem evaluasi nasional diperlukan agar model ini dapat diimplementasikan secara massif. Penelitian tentang strategi advokasi kebijakan dan analisis politik pendidikan menjadi relevan untuk melengkapi penelitian ini.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, model *Fiqh al-Ta'ayush* menawarkan fondasi konseptual yang kokoh untuk mentransformasi pendidikan Islam dari mesin reproduksi kesalehan individual menjadi laboratorium pembebasan sosial. Ia adalah undangan untuk memulai perjalanan panjang menuju pendidikan Islam yang relevan dengan tantangan zamannya, setia pada tradisinya tetapi tidak terjebak di dalamnya, dan berani memasuki ruang-ruang publik yang selama ini ditinggalkan kosong.

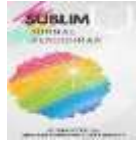
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa politik identitas di Indonesia merupakan hasil interaksi sistemik antara kemandulan ideologis partai, desentralisasi tanpa pelembagaan representasi, dan algoritma media sosial yang memproduksi polarisasi. Resistensi kewargaan yang ada, meskipun penting, menghadapi keterbatasan struktural dan memerlukan transformasi paradigmatik.

Pendidikan Islam, melalui dekonstruksi epistemik berbasis teori kritis, dapat keluar dari jerat reproduksi kesalehan individual menuju proyek pembebasan sosial. Revitalisasi nalar *burhani*, integrasi kepentingan emansipatoris, dan pembacaan dialektis atas teks dan realitas menjadi fondasi bagi lahirnya model pembelajaran yang transformatif.

Model pembelajaran *Fiqh al-Ta'ayush* yang dihasilkan menawarkan kerangka operasional yang konkret melalui lima fase: identifikasi masalah, telaah teks-konteks, dialog musyawarah, perumusan solusi berbasis *maqāṣid*, dan refleksi komitmen publik. Model ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, sistem evaluasi yang komprehensif, serta contoh implementasi pada kasus-kasus aktual.



Dengan internalisasi model ini dalam kurikulum PAI, pendidikan Islam dapat berkontribusi signifikan pada konsolidasi demokrasi Indonesia 2026-2029 melalui penguatan legitimasi sistem demokrasi, peningkatan kualitas partisipasi publik, dan ketahanan sosial terhadap narasi politik identitas yang eksklusif.

6.2 Saran

Bagi Kementerian Agama dan Kemdikbudristek: Segera lakukan kajian dan uji coba terbatas model *Fiqh al-Ta'ayush* di sejumlah sekolah dan madrasah sebagai bagian dari penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Sediakan anggaran untuk pengembangan bahan ajar, pelatihan guru, dan riset evaluasi.

Bagi Lembaga Pendidikan Islam: Integrasikan pendekatan kritis dan interdisipliner dalam kurikulum. Jadikan kampus dan pesantren sebagai laboratorium demokrasi yang mempraktikkan koeksistensi secara nyata, misalnya melalui program pertukaran pelajar lintas iman, magang di lembaga advokasi kebijakan, atau kolaborasi riset dengan berbagai komunitas.

Bagi Guru dan Dosen PAI: Kembangkan kapasitas diri dalam pedagogi kritis dan fasilitasi dialog. Manfaatkan berbagai pelatihan dan sumber belajar yang tersedia. Beranilah menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga masuk ke ruang publik untuk mengadvokasi kebijakan inklusif.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Lakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji efektivitas model *Fiqh al-Ta'ayush* secara empiris. Kembangkan instrumen evaluasi yang mampu mengukur *civic disposition* secara valid dan reliabel. Lakukan studi komparatif antara berbagai setting pendidikan. Telusuri juga kemungkinan pengembangan model serupa untuk pendidikan agama lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abadi, M. Z. (2024). Politik identitas di panggung demokrasi: Melihat simbol agama melalui lensa habitus dan dramaturgi. *Politik Islam*, 3(2), 96-

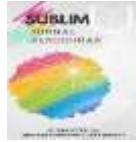
112. <https://doi.org/10.31958/pi.v3i2.13898>

Abdiyah, L. (2021). Filsafat pendidikan Islam: Pendidikan multikultural. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 24-31. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1827>

Adam, Y. F. (2022). Islam dan politik identitas: Konflik pada gerakan 212 dalam perspektif sejarah Indonesia. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6(2), 88-

103. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>

Afandi, I. (2017). Mu'min, kafir dan munafiq: Politik identitas kewargaan di awal Islam (Kajian tentang QS. Al-Baqoroh: 1-20). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi*



dan Pemikiran Hukum Islam, 9(1), 62-78. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i1.117>

Agustian, T. (2020). Demokrasi Islam dalam pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri. *EL-Ghiroh, 18*(1), 7-24.

Akli, B., & Noviani, D. (2023). Paradigma filosofis toleransi dalam moderasi beragama. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 111-128. <https://doi.org/10.53649/symfonia.v3i2.82>

Budiyono. (2020). Model pendidikan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di IAIN Pontianak. *Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual*, 4(3), 405-418. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v4i3.238

Halim, M. (2022). Pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralitas beragama (Suatu tinjauan pendidikan Islam). *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2078>

Ibrahim, R. (2008). Pendidikan multikultural: Upaya meminimalisir konflik dalam era pluralitas agama. *el-Tarbawi, 1*(1), 115-127. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art9>

Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam multikultural dalam indikator moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*. <https://pdfs.semanticscholar.org/55bc/46ec7045d9443d1bfa6bf3fba6e78c6c0192.pdf>

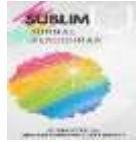
Khumaini, F., Burhanuddin, H., & Wiranata, R. R. S. (2023). Pendidikan moderasi beragama: Integrasi epistemologi keislaman dalam menyikapi pluralitas agama di Indonesia. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6(2), 318-335. <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.878>

Muhammad, N. A. (2021). Populisme dan dinamika otoritas keagamaan dalam Islam di media sosial. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 113-128.

Mutakallim. (2018). Pendidikan pluralisme melalui kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kemajemukan. *Inspiratif Pendidikan*, 7(2), 307-325. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i2.7914>

Nasution, B. (2026). Literasi dan transformasi pendidikan Islam dalam penguatan identitas keislaman di tengah modernisasi. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 6(3), 1100-1111. <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i3.3122>

Naufan, M. R., & Hannase, M. (2021). Mendudukan ulang populisme Islam: Karakter



SUBLIM: Jurnal Pendidikan
E-ISSN : 2985-5357
Volume 05, Issue 01 April 2024
<https://ummaspul.e-journal.id/Sublim>

politik identitas dan perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 1120-1133. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.256>